

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asyhadie, H. Zaeni. et.al., 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga. Jakarta

Bappenas, 2010, *Buku Saku Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur*, Bappenas, Jakarta.

Bappenas, 2011, *PPP Book*, Bappenas, Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2009, “*Memori Akhir Tugas Menteri Pekerjaan Umum- Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009*”, Kementrian Pekerjaan Umum, Jakarta.

Fathoni, Abdurrahman, 2006, *Metologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta

Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung

Hernoko, Agus Yudha, 2008, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta

Hornes, C.F. and Liebscher, L.M., 1980, *The Hamlyn Pocket Dictionary of Business Terms*, The Hamlyn Publishing Group Limited, London

Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta

Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Yogyakarta

Meliala, A. Qirom., 1985, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta

Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta

Mukti, dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Naja, H.R. Daeng, 2006, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Notosoegondo, H., 2005, *Toll Road Investment Opportunities in Indonesia*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta
- Saliman, Abdul. R., 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Salim H.S., 2004, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____. 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soemitro, H. Ronny, 1981, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Subekti, R., 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Domatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- The World Bank, 1994, *World Development Report 1994: Infrastructure for Development*, Oxford University, Oxford

B. Jurnal

- Adha,Lalu Hadi. 2011. “Kontrak Build Operate Sebagai Perjanjian Kebijakan Pemerintah Dengan Pihak Swasta”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11.
- Aziz, A.M.A.. 2007. “Successful Delivery of Publi-Private Partnerships for Infrastructure Development”. *Journal of Construction and Management*. Vol. 133. No. 12.
- Pessoa. 2008. “Public Private Partnerships in Developing Countries: Are Infrastructure Responding to The New ODA Strategy?”. *Journal of International Development*. Vo/ 20. No. 3.

C. Koran

- Harian Investor Daily*, 5 Agustus 2009.

“Sejarah Panjang Tol Bocimi: Mangkrak Hingga Gonta-ganti Investor”,
DetikFinance, Rabu 21 Juni 2017.

D. Internet

<http://kbbi.web.id/narasumber>, dikases pada 05 Februari 2017 pukul 11.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl784/syarat-dua-perusahaan-dalam-negeri-membuat-joint-venture>, diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 14.05 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56d78548a9099/wow-ganti-rugilah-harus-lebih-tinggi-dari-njop>, diakses pada 27 September 2017 pukul 15.32 WIB.

E. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 39

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 67.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 106.

Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587.

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/ Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 62.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.